



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FATKHURROZI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
3. NHK : 999211

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 7.791.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/204 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 1.010.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 770 m2/280 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.510.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.470 m2/1.470 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 1.110.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 6.800 m2/6.800 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, Rp. 2.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/700 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 1.510.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.400 m2/1.400 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 151.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 522.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.



16.000.000

5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

12.000.000

6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 25.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 150.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 50.000.000

**Sub Total**

Rp. 8.538.000.000

**III. HUTANG**

Rp. 77.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 8.461.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.